

MEDIA DAN KEPENTINGAN PUBLIK: PRAKTIK MEDIA MASSA MENURUT TEORI NORMATIF

Oleh Karman*

Abstract

The media should be in the service of the public interest. This issue becomes a focus of normative theory. This theory refers to the ideas of truth, media responsibility, and fulfillment of individual and society expectations. These articles dealt with ideas about how the media should, expectations to the media, how the media are managed, in the context of the public interests. Expectations to the media also will be viewed from the mass media mode. Those ones are Model of the Communist Soviet, Otoritarian Theory, Libertarian Theory, and Theory of Social Responsibility. This article also set forth criticism to this theory from the aspect of both theory and methodology.

Keywords: *mass media, normative theory, public interest*

Abstrak

Media massa seharusnya mengabdikan kepada kepentingan publik. Ini menjadi fokus pembahasan Teori Normatif. Teori ini merujuk kepada ide-ide tentang kebenaran dan tanggung jawab media, serta pemenuhan harapan individu dan masyarakat. Tulisan ini mengkaji ide mengenai bagaimana media seharusnya, harapan terhadap media, bagaimana media diorganisir dan bagaimana media berperilaku dalam konteks kepentingan publik. Ekspektasi kepada media juga akan dilihat dari model media massa yakni Model Komunis Soviet, Teori Otoritarian, Teori Libertarian, dan Teori Tanggung Jawab Sosial. Pada pembahasan juga diketengahkan kritik terhadap teori ini dari aspek teori dan metodologi.

Kata Kunci: media massa, teori normatif, kepentingan publik.

1. Pendahuluan

Media massa diasumsikan tidak hanya memiliki efek tertentu terhadap masyarakat tetapi juga mengabdikan kepada tujuan sosial-kemasyarakatan atau kepentingan publik (*public interest*). Artinya bahwa efek yang ditetapkan ini dinilai positif. Efek ini mencakup efek penyebaran informasi, penyuaran pandangan masyarakat, dan pendapat yang berbeda/bertentangan, membantu pembentukan opini publik terkait dengan persoalan tertentu, serta memfasilitasi terciptanya debat publik.

Banyak kegiatan hiburan dan aktivitas budaya media massa yang tujuannya sudah ditentukan. Kemana efek media ditujukan dapat dilihat dengan cara melihat siapa pemilik media tersebut, siapa yang bekerja di media tersebut, dan untuk siapa *channel* komunikasi tersebut diberikan, misalnya apakah kepada pemerintah atau kepada individu yang *powerfull*. Tidak heran jika banyak perbedaan pendapat mengenai apa yang

seharusnya dan yang tidak seharusnya dilakukan oleh media massa.

Banyak hal yang diharapkan kepada media. Ketika berbicara tentang Teori Normatif, kita akan merujuk kepada ide-ide tentang kebenaran dan tanggung jawab media, serta pemenuhan harapan individu dan masyarakat. Mustahil memisahkan ide tentang hubungan 'objektif' antara media dan masyarakat dari pertimbangan normatif dan pertimbangan ideologis. Ini antara lain karena kriteria dan konsep yang digunakan untuk menggambarkan dan untuk menaksir cara kerja media melibatkan pertimbangan nilai (*value judgement*), misalnya ketika kita berbicara tentang kebebasan, identitas, integritas, diversitas, dan bahkan informasi itu sendiri.

Tulisan ini akan mengkaji ide mengenai bagaimana media seharusnya, harapan terhadap media, bagaimana media diorganisir dan bagaimana media berperilaku dalam konteks

kepentingan publik yang lebih luas atau demi kemaslahatan masyarakat secara umum.

2. Pembahasan

Masyarakat menaruh harapan kepada media massa dalam kaitannya dengan nilai-nilai ide tentang kebenaran, tanggung jawab sosial media dalam memenuhi harapan individu dan masyarakat, sesuatu yang seharusnya (*dasein*). Hal ini menjadi titik fokus dari teori Teori Normatif.

Sumber kewajiban normatif terhadap media berupa teori sosial politik dalam media, teori profesional dan praktek jurnalisme, pendapat publik sebagai warga negara (*public opinion*), publik sebagai khalayak, pasar media (*media market*), negara dan sistem kelembagaannya, serta pihak yang berkepentingan (*stake holder*) dalam masyarakat dipengaruhi oleh media massa.

Lepas dari semua keterkaitan kepentingan di atas adalah bahwa media massa memiliki kewajiban untuk memenuhi kepada publik. Kepentingan publik sendiri –dalam kaitannya dengan media massa- adalah melakukan sejumlah hal yang dianggap penting, mendesak, prinsip dasar yang mengatur masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, demokrasi, dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya. Namun, media massa dibangun biasanya tujuan media massa adalah untuk mendapatkan keuntungan. Adapun kriteria media massa agar sesuai dengan kepentingan publik dijelaskan pada paragraf-paragraf berikut ini.

Berikut ini adalah tipe masalah yang mencuat ke permukaan, dalam debat yang berkaitan dengan relasi antara media dengan masyarakat sebagaimana dirangkum oleh Denis McQuail dalam bukunya yang berjudul *Theories of Human Communication*. Teori normatif dapat dipetakan dalam hal isu yang muncul mengenai struktur media, perilaku atau kerja media.

Pertama, Struktur Media. Isu yang mencuat seputar ini adalah tentang aspek berikut ini :

- 1) Kebebasan media (*media freedom*). Media harus bebas dari kontrol pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Media bebas dan independen dalam melaporkan berita dan memenuhi kebutuhan khalayak. Kebebasan terlihat dengan ketidakadaan sensor, lisensi, atau hukuman atas publikasinya yang dianggap melanggar hukum (*illegal, unlawful*).
- 2) Pluralitas dan kepemilikan (*plurality of ownership*). Media seharusnya tidak didominasi kelompok kepentingan tertentu.

Warga bebas mengakses sebagai pengirim atau sebagai penerima media yang menggambarkan ide dan memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Tipe media yang berbeda seharusnya dimiliki berbeda juga (misalnya cetak, dan penyiaran).

- 3) Perbedaan saluran dan bentuk (*diversity of channel and forms*). Struktur media seyogyanya memiliki tipe media yang berbeda dan saluran yang terpisah untuk memaksimalkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan publik akan komunikasi.
- 4) Perbedaan informasi, opini, dan budaya (*diversity of information, opinion, and cultural content*). Media seharusnya menggambarkan keanekaragaman masyarakat dalam hal daerah, politik, agama, etnik, budaya, dan sebagainya. Media seharusnya terbuka bagi gerakan baru dan ide baru dan memberikan akses cukup bagi minoritas.

Kedua, isi media. Isi media harus mampu menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan negara. Di saat media –di luar kewajaran- dituntut mengerjakan sesuatu yang lazim dilakukan oleh aparat kepolisian atau pihak otoritas dalam hal ini pemerintah, yaitu mengawasi secara kritis, ada pandangan yang luas di negara-negara demokrasi yang mengakui adanya pembatasan kebebasan media yang diakui secara syah. Kondisi yang memungkinkan isu ini mencuat adalah biasanya kondisi yang ekstrem, turbulensi, kekacauan, seperti perang, saat mendapat ancaman, bencana alam, konflik, dan teroris. Tuntutan kepada mendukung tercapainya ketertiban masyarakat sepanjang itu kejahatan yang biasa. Yang patut dicamkan adalah kewajiban yang disebutkan di atas berlaku pula bagi warga negara.

Isi media juga harus menjaga kualitas penyediaan budaya (*quality of cultural provision*). Permasalahan yang termasuk dalam kategori ini adalah masalah moral, masyarakat sipil dan nilai estetika. Kualitas penyediaan budaya ini dilihat –tentunya- dari konteks standar dan perspektif yang berbeda. Isi media juga diharapkan oleh masyarakat –dalam konteks demokrasi- mendukung proses demokrasi. Ini merujuk pada harapan yang besar kepada media massa untuk berkontribusi pada suatu hal yang esensial dalam sistem politik dan sosial. Media massa memberikan akses kepada semua pihak untuk menyuarakan pendapatnya, serta memfasilitasi warga dalam kehidupan sosial politik.

Isi media juga dituntut bisa memenuhi kewajiban internasional (*meeting international*

obligation). Media selain sebagai institusi nasional, ia juga menjadi anggota dari komunitas yang lebih luas, yaitu komunitas internasional. Oleh karena itu, isu-isu internasional bisa muncul seperti pemberitaan tentang negara lain yang bisa saja memicu kebencian bahkan propaganda perang. Selain itu, sisi positifnya adalah ada persoalan yang dapat disusung bersama seperti penanggulangan bencana, darurat, isu kesehatan dan lingkungan.

Media secara etika tidak boleh (*pertama*) mengabaikan atau tidak menghormati hak individu. Media terkadang mengganggu hak individu, walaupun itu dilindungi oleh hukum atau pendapat umum. Isu yang sering terjadi adalah pencemaran nama baik (*libel*) fitnah, dan hal lain yang mencoreng reputasi individu. *Kedua*, media tidak boleh membahayakan masyarakat (*harm to society*). Rasa takut acapkali ditimbulkan oleh publikasi media massa yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, walaupun efek ini tidak disengaja. *Ketiga*, membahayakan individu (*harm to individuals*). Banyak kasus dimana media memainkan peran yang mendorong berbuat jahat, bunuh diri. Konten berisi pornografi dapat menimbulkan perilaku imitasi. Termasuk juga perilaku teroris.

2.1. Pers Sebagai Pilar Keempat

Pembungkaman kebebasan berpendapat merampas hak generasi masa kini dan yang akan datang, mereka yang berbeda pendapat melebihi yang sepatutnya. Jika pendapat itu benar, mereka kehilangan kesempatan merubah kesalahan menjadi kebenaran; jika salah mereka kehilangan banyak manfaat, persepsi yang jelas, dan kebenaran yang berkesan akibat berlutut dengan kesalahan (John Stuart Mill: 1859; *on the liberty of the press: key quotation*).

Teori tentang normatif diilhami oleh komisi yang dibentuk tahun 1947 (*The 1947 Commission*) tentang Kebebasan Pers dan Teori Tanggungjawab Sosial. Proposisi utama teori tanggung jawab sosial adalah 1) media punya kewajiban kepada masyarakat, dan kepemilikan media adalah kepercayaan publik; 2) media berita harus jujur, akurat, transparan, objektif, dan relevan; 3) media harus bebas tapi mawas diri; 4) media harus mematuhi kode etik dan aturan profesional; 5) dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat melakukan intervensi demi kepentingan publik.

Oleh karena itu, media massa harus mengedepankan profesionalisme. Ini dalam dunia

jurnalisme menjadi bahasan yang penting dan tidak bisa lepas dari kaitannya dengan dewan pers sebagai badan yang menggambarkan prinsip dan praktik jurnalisme yang baik, dalam bentuk kode etik. Pembahasan tentang perbandingan kode jurnalistik di dunia Eropa disampaikan oleh Laitila (1995). Media massa yang profesional adalah media yang mengedepankan akuntabilitas, yang mencakup kebenaran informasi, kejelasan informasi, pembelaan terhadap hak publik, tanggung jawab dalam membentuk opini publik, standar norma dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi, menghormati integritas sumber.

Momen signifikan dalam perkembangan teori media dimulai dengan publikasi buku karya 3 (tiga) penulis Amerika (Siebert, et al., 1956). Buku yang mengundang banyak tanggapan baik positif maupun negatif ini berisi tentang empat teori pers, yakni *Teori Pers Komunis Soviet, Teori Otoritarian, Teori Libertarian, dan Teori Tanggung Jawab Sosial*.

a. *Teori Komunis Soviet*

Dalam teori Soviet, kekuasaan bersifat sosial, berada di orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat. Kekuasaan mencapai puncaknya jika digabungkan dengan sumberdaya alam dan kemudahan produksi dan distribusi, dan jika ia diorganisir dan diarahkan. Partai Komunis memiliki kekuatan organisasi ini. Partai tidak hanya menyelipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin massa. Partai menciptakan massa dengan mengorganisirnya dan membentuk organ-organ akses dan kontrol yang merubah sebuah populasi tersebar menjadi sebuah sumber kekuatan yang termobilisir. Partai menganggap dirinya sebagai suatu staf umum bagi masa pekerja. Menjadi doktrin dasar, mata dan telinga bagi massa.

Negara Soviet bergerak dengan program-program paksaan dan bujukan yang simultan dan terkoordinir. Pembjukan adalah tanggungjawab dari para agitator, propagandis dan media. Komunikasi massa dalam teori ini digunakan secara instrumental, yaitu sebagai instrumen negara dan partai. Komunikasi massa secara erat terintegrasi dengan instrumen-instrumen lainnya dari kekuasaan negara dan pengaruh partai. Komunikasi massa digunakan untuk instrumen persatuan di dalam negara dan di dalam partai. Komunikasi massa hampir secara eksklusif digunakan sebagai

instrumen propaganda dan agitasi. Terakhir, komunikasi massa ini punya ciri adanya tanggung-jawab yang dipaksakan.

b. *Teori Otoritarian*

Teori ini menggambarkan dua abad lebih kontrol terhadap pers oleh berbagai macam tekanan rezim yang berkuasa. Dr. Samuel Jhonson, seorang penulis Inggris menggambarkan teori ini sebagai hak untuk menjaga perdamaian dan ketertiban umum, yang dengannya memiliki hak untuk melarang opini dan propaganda yang tendensius dan berbahaya. Mengacu kepada pendapat Jhonson, maka bukan hakim yang memiliki hak, melainkan masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa pengekan opini secara moral bias jadi salah, namun secara politik, ia bias dibenarkan.

c. *Teori Libertarian*

Buku Siebert, dkk diterbitkan dalam keadaan kritis pada Perang Dingin dimana Amerika Serikat mencoba untuk mengomunikasikan ideologi mereka sendiri tentang liberalisme dan perusahaan bebas secara aktif, dan model kebebasan pers itu sendiri dalam masalah ini menjadi sangat penting (Blanchard, 1986). Mitos tentang kebebasan pers berkembang di masyarakat karena mitos tersebut ada dalam keinginan pemilik media untuk mengabadikannya.

Nerone (1995) mengemukakan empat hal terkait teori libertarian. Pertama, teori libertarian mengenalkan kebebasan pers sangat dekat dengan kepemilikan sarana publikasi. Sarana publikasi bisa dimiliki secara bebas seperti layaknya sebuah harta benda. Kedua, libertarian terlalu dipandang sebagai konsep yang negatif. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang yang positif seperti menurut Glasser, teori libertarian bisa menghasilkan konsep dan ide baru yang memberi keuntungan dengan menempatkan kebebasan dan tanggung jawab secara berdampingan. Ketiga, seperti yang telah kita ketahui, teori libertarian nampaknya tidak terimplementasikan dengan baik ke media. Teori ini terlalu banyak berisitentang opini dan kepercayaan dibanding berbicara tentang informasi dan isu-isu baru tentang kebebasan yang berkembang di masyarakat. Keempat, teori tersebut terbilang samar-samar ketika berbicara tentang siapa yang memiliki dan siapa yang diuntungkan atas hak kebebasan. Jika yang memiliki hak adalah pemilik media, maka apa hak editor, jurnalis,

dan masyarakat. Termasuk juga ke dalam hal yang samar saat menjelaskan tentang dimana dan sampai sejauh mana batas-batas kebebasan itu.

d. *Teori Tanggung Jawab Sosial*

Teori Tanggungjawab sosial punya asumsi utama bahwa kebebasan memiliki tanggung jawab yang sepadan. Keempat teori pers ini terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan kondisi media dan masyarakat yang juga sangat dinamis.

2.2. Media Massa Sebagai Ruang Publik

Kehidupan masyarakat sipil adalah salah satu keterbukaan dan keberagaman, di mana ada otonomi dan badan-badan sukarela di antara warga negara dan negara yang menyediakan keamanan bagi rakyat. Media yang terbuka, bebas, dan beragam adalah salah satu lembaga perantara yang paling penting dalam masyarakat sipil. Cara media mendukung ranah publik adalah dengan memperluas ruang debat, mengukur informasi dan ide-ide sebagai dasar pendapat publik, menghubungkan rakyat dan pemerintah, menentang monopoli pemerintah berkaitan dengan politik, memperluas kebebasan dan keberagaman dari publikasi.

Salah satu solusi dari ketidakpuasan terhadap media yang seharusnya menjadi ranah publik adalah *civic journalism* atau *public journalism*. Anggapan dasar dari gerakan *public journalism* adalah jurnalisme yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat melalui partisipasi dan debat. Ketidakpuasan terhadap media yang *mainstream*, telah melahirkan beberapa perspektif teoritis yang berbeda tentang peran media.

Pertama, Teori Media Emansipatoris. Cabang Teori Kritis yang melahirkan media skala kecil (*grass-roots communication*) yang independen, sebagai bentuk perlawanan dari dominasi media-media *massamainstream*. Menurut Downing (2000), teori ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menyuarakan secara langsung suara oposisi secara vertikal dari tempat yang bawah (*subordinate*) pada struktur kekuasaan dan aturan/perilaku; dan untuk membangun dukungan, solidaritas dan jaringan lateral melawan kebijakan tertentu yang sering digunakan untuk membangkitkan suatu gerakan sosial yang baru (*new social movement*).

Kedua, Teori Komunitarian dan Media. Komunitarianisme menekankan kembali pada ikatan sosial yang menghubungkan antar

masyarakat. Media dan khalayak saling berbagi karakter, khususnya berbagi identitas sosial dan tempat (komunitas). Menurut Christians (1993), Komunitarian lebih menekankan pada etika media yang sangat penting yaitu berdialog dengan publik/masyarakat. Menurut Nerone (1995), Komunitarian adalah media memiliki peran/tugas yang lebih besar di masyarakat yaitu transformasi masyarakat. Revitalisasi masyarakat terbentuk oleh norma-norma komunitas/kelompok masyarakat yang menjadi arah tujuan media. Berita menjadi agen transformasi komunitas.

Teori Normatif Media itu sendiri memiliki empat model. *Pertama*, Model Pasar atau Liberalis-pluralis. Mengidentifikasi kebebasan pers melalui kebebasan memiliki dan menjalankan usaha penerbitan media/pers tanpa campur tangan dari negara. Ruang publik disuguhkan oleh ide kebebasan berekspresi media/pers (*free marketplace of idea*). *Kedua*, Model Kepentingan Umum atau Tanggung Jawab Sosial. Hak kebebasan media/pers dibarengi dengan kewajiban terhadap masyarakat luas sehingga kebebasan media/pers harus melibatkan tujuan-tujuan sosial. Tanggung jawab media mempertahankan standar/mutu yang tinggi melalui swa-regulasi (*self-regulation*) tanpa adanya intervensi dari pemerintah.

Ketiga, Model Profesional. Perhatian utamanya adalah melayani kebutuhan masyarakat akan informasi/saran/pendapat serta mengekspresikan keanekaragaman cara pandang. Otonomi institusi dan profesional jurnalis dapat menjaga atau mengawasi jalannya kekuasaan.

Keempat, Model Media Alternatif. Terdapat pembagian nilai, khususnya penekanan pada skala kecil dan organisasi akar rumput, partisipasi, komunitas, dan tujuan bersama. Menekankan pada hak-hak sub budaya beserta nilai partikularistiknya dan mengembangkan pemahaman intersubjektif dan kesadaran nyata masyarakat/komunitas.

2.3. Diskusi

Dari sisi aksiologis (nilai), teori ini sangat jelas mengedepankan etika yang harus dijalankan media dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nilai tersebut adalah tanggung jawab kepada publik seperti kepentingan publik, ketertiban masyarakat, keharmonisan, tanggung jawab, kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Media diharapkan tidak mengedepankan nilai personal (*vested-interest*). Agar media bisa mencapai tujuan ini, Teori Normatif memberikan panduan

bagaimana struktur media (seperti komposisi kepemilikan media), konten yang seharusnya dimuat. Asumsi dan penjelasan teori ini mengandung kritik/pendapat dari 2 (dua) aspek, yaitu: aspek teoritis dan aspek metodologis.

Dari aspek Teoretis dapat diutarakan sebagai berikut. Teori Normatif mengasumsikan masyarakat pasif sehingga sangat rentan oleh pemberitaan media massa. Masyarakat sebenarnya terdiri dari individu yang aktif, *homo luden*. Dalam kaitannya dengan media, keaktifan ini terwujud dalam penggunaan media dan konten media yang didasari oleh pemenuhan (gratifikasi tertentu) sebagaimana yang dipostulatkan oleh Teori *Uses And Gratification (U & G)*. Menurut hasil penelitian, tipologi gratifikasi dan konteks penggunaan media, serta konten dan media yang digunakan semakin beragam, bukan hanya media tradisional yang dikonsumsi tetapi juga media baru atau internet dengan berbagai fasilitasnya. Ini adalah bukti bahwa khalayak tidak pasif. Khalayak tak hanya aktif memilih tapi juga membuat media alternatif di dunia maya sebagai *citizen journalist*.

Littlejohn (1996) mengatakan bahwa kepercayaan seseorang tentang isi media dapat dipengaruhi oleh: (1) budaya dan institusi sosial seseorang, termasuk media itu sendiri; (2) keadaan-keadaan sosial seperti ketersediaan media; dan (3) variabel-variabel psikologis tertentu, seperti introvert-ekstrovert dan dogmatisme. Nilai-nilai dipengaruhi oleh (1) faktor-faktor kultural dan sosial; (2) kebutuhan-kebutuhan; dan (3) variabel-variabel psikologis. Hal ini dapat dianalisis dengan model *Expectation-value Theory* yang dikembangkan dari Teori *Uses & Gratification* (Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch). Philip Palmgreen mengembangkan konsep dalam mengukur kepuasan dalam menggunakan suatu media, yaitu kepuasan yang nyata yang diperoleh seseorang setelah mengonsumsi suatu jenis media tertentu (*gratification obtained*) adalah berdasarkan motif yang mendorong seseorang mengonsumsi media tersebut (*gratification sought*). Dengan kata lain menurut Palmgreen, *gratification sought* dibentuk dari kepercayaan seseorang mengenai apa yang media dapat berikan dan evaluasi seseorang mengenai isi media¹.

Pada prakteknya, media massa *mainstream* lebih condong kepada kebutuhan *media market* yang lebih dominan/mayoritas ataupun

¹Rachmat Kriyantono. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, hal. 211

kepentingan-kepentingan pemodal/pengiklan dalam menghadapi kompetisi yang ketat. Di sini kami melihat posisi media sebagai media/pers dalam arti sebenarnya dan media sebagai industri/perusahaan. Pada dasarnya ada tiga sumber utama yang menjadi sumber penunjang kehidupan industri media, yaitu: modal (*capital*), jenis isi media (*types of content*), dan jenis khalayak (*types of audience*). Dengan demikian kompetisi antarmedia pada dasarnya adalah kompetisi untuk memperebutkan ketiga sumber daya tersebut².

Kemajuan teknologi informasi pada media massa *mainstream* maupun media alternatif, telah memberikan dampak internal bagi perkembangan media itu sendiri serta dampak eksternal yang luas terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek lainnya yang menyentuh kehidupan masyarakat dewasa ini. Revolusi Mesir dipelopori para pemuda yang saling terkoneksi di dunia maya. Seorang pemuda bernama Wa'el Ghoneim (30) membuat akun Facebook dengan nama *We are all Khaled Said*, pada Juni 2010, yang bertujuan untuk mengancam pembunuhan, Khaled Said, seorang pengusaha Alexandria, Mesir, oleh polisi setempat. Dari sanalah pergolakan menentang Mubarak semakin besar, sementara pemerintahan Mesir menganggap remeh hal tersebut³. Melalui Teori Media Ekologi, Marshall McLuhan berasumsi bahwa *The Medium is The Message* (kekuatan media sangat mempengaruhi khalayak/masyarakat, bukan isi pesannya). Media mempunyai kemampuan untuk mengubah cara berpikir kita tentang orang lain, diri sendiri, dan dunia/lingkungan sekitar kita⁴.

Teori ini mengasumsikan pembentukan kepentingan publik, dan opini publik, ditentukan oleh media massa (*agenda setting*). Padahal tak selamanya opini media mempengaruhi opini publik, bisa saja melalui *opinion leader (two step flow communication)* atau bahkan sebaliknya yaitu khalayak itu sendiri seperti kasus pengumpulan koin peduli Prita oleh komunitas blogger melalui

koinkeadilan.com⁵ dan kasus konfrontasi Cicak dan Buaya dari tahun 2008 hingga 2011⁶.

Teori Normatif menghendaki media harus bebas dari kontrol pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Seiring dengan proses demokratisasi di Negara Indonesia, memang kontrol pemerintah terhadap media minimal berbeda ketika di era orde baru. Namun, sulit bagi media untuk bebas dari kontrol kelompok kepentingan tertentu. Media memiliki kecenderungan terhadap kelompok yang kuat baik dari sisi ekonomi, politik.

Di Indonesia, media massa semisal TV difungsikan untuk mendongkrak tokoh partai politik untuk kepentingan pemilu 2014. Independensi media penyiaran publik di Indonesia dari campur tangan penguasa pun dipertanyakan. Kasus LPP TVRI atas penayangan siaran Konvensi Partai Demokrat pada Minggu, 15 September 2013 selama lebih dari 2,5 jam telah memperlihatkan ketidaknetralan LPP TVRI sebagai media penyiaran publik di Indonesia. LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak memegang teguh prinsip-prinsip jurnalistik, yaitu prinsip perimbangan dan tidak memihak, sehingga KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran dan meminta LPP TVRI membuat surat pernyataan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai politik peserta Pemilu⁷.

3. Kesimpulan

Pluralitas dan kepemilikan (*plurality of ownership*) media sulit untuk tidak didominasi kelompok kepentingan tertentu. Pengusaha media cenderung meningkatkan akumulasi modal sehingga cenderung oligarkis atau monopoli (konglomerasi media). Sehingga konten-konten yang disuguhkan beberapa media massa *mainstream* kerap ditunggangi berbagai macam kepentingan pemilikinya.

Keanekaragaman masyarakat, potret monografi kebhinekaan Indonesia dalam hal daerah, politik, agama, etnik, budaya, dan sebagainya mustahil dicapai oleh media massa. Yang muncul adalah media memiliki kecenderungan terhadap daerah, agama tertentu.

²*Ibid*, hal. 277

³<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/01/19/ly1vxi-ternyata-revolusi-mesir-dimulai-dari-jejaring-sosial>, diakses pada tanggal 24 September 2013.

⁴Richard West & Lynn H. Turner, *Introducing to Communication Theory: Analysis and Application*, (New York: McGraw-Hill, 2007), hal. 468

⁵<http://www.tempo.co/read/news/2009/12/11/064213340/Pengumpulan-Koin-Peduli-Prita-Ditutup-14-Desember>, diakses pada tanggal 24 September 2013.

⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Konfrontasi_Cicak_dan_Buaya, diakses pada tanggal 24 September 2013.

⁷<http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/31612-kpi-beri-teguran-tvri-terkait-siaran-konvensi-demokrat>, diakses pada tanggal 24 September 2013/

Referensi

Misalnya dalam pemberitaan konflik di Ambon dulu, atau pemberitaan media massa tentang kepala daerah yang ikut mendemo pemerintah. Sinetron TV pun didominasi tentang kehidupan kaum metropolis-borjuis dengan tema yang dapat dikatakan sama antara satu media dengan media lainnya (gejala konsonansi).

Teori ini menghendaki agar media tidak mengabaikan hak individu dengan melakukan pencemaran nama baik (*libel*), fitnah. Media juga tidak membuat pemberitaan yang membahayakan masyarakat, termasuk penayangan vulgar isu eksrem seperti pornografi, terorisme. Dalam tataran praktis, media -karena tujuannya untuk mendapat laba- sering terjerembab pada perilaku yang mengabaikan hak privasi individu, penayangan acara teroris secara detil. Ini disebabkan media memberhalakan *rating* sehingga kepentingan publik terabaikan.

Adapun dari aspek methodologis, kritik dapat diajukan sebagai berikut. Bila dikategorikan dengan pembagian paradigma penelitian menurut Guba, aspek metodologi Teori Normatif tergolong pendekatan positivisme yang menghendaki aktor sosial, individu haruslah objektif dan memegang asas imparialitas, mengesampingkan nilai personal dan mengutamakan kepentingan publik.

Dalam praktik pemberitaan media massa di Indonesia, media massa melakukan hal sebaliknya. Media melakukan politik pemberitaan, mengonstruksi realitas sesuai dengan nilai, denominasi atau kecenderungan media itu sendiri. Teori Normatif nampaknya abai terhadap realitas bahwa media massa didirikan untuk tujuan kepentingan tertentu. Dalam kasus yang tertentu seperti berita terkait Sengketa Blok Ambalat, rencana pengesahan RUU APP, media acapkali terlibat perang wacana.

Bahkan media bisa jadi alat perjuangan ideologi kelas tertentu dan melawan ideologi dominan. Ini biasa ditemukan di media yang didirikan oleh organisasi masa (seperti Hizbut Tahrir Indonesia) yang menerbitkan majalah Al-Wa'ie, tabloid media ummat, tabloid suara islam yang bertujuan menyebarkan ide-ide antidemokrasi, penentangan terhadap kapitalisme, sosialisme dan memperjuangkan sistem ketatanegaraan yang baru.

Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

McQuail, Denis. 2010. *Theories of Mass Communication (6th Edition)*. London : Sage Publication

West, Richard & Lynn H. Turner. 2007. *Introducing to Communication Theory: Analysis and Application*. New York: McGraw-Hill.

<http://www.kpi.go.id>

<http://id.wikipedia.org>

<http://www.republika.co.id>

<http://www.tempo.co>

* **Karman, S.Sos.**

Peneliti Bidang Komunikasi & Media Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Jakarta, Badan Litbang SDM Kemenkominfo.

Email : karmansalim@gmail.com